

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan kemajuan teknologi saat ini, humas memegang peranan penting baik dalam memberikan konfirmasi kepada masyarakat maupun membantu mencari solusi atas permasalahan yang muncul. Hal ini juga berperan strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemerintah, khususnya dalam membangun reputasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di mata masyarakat. Public Relations dapat dipahami sebagai suatu orientasi dan konsep fungsi yang diperankan suatu pihak dalam interaksi sosial, yang memungkinkan baik perorangan ataupun kelompok berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat atau lingkungannya (Riyadi, 2003).

Kata “humas” merupakan salah satu kata yang sering kita jumpai dan kenal. Modernitas mempengaruhi hampir setiap elemen kehidupan, dan perjumpaan antara orang-orang dari lingkungan dan kelompok yang berbeda tidak bisa dihindari, khususnya di era globalisasi ini. Hal ini konsisten dengan gagasan bahwa manusia merupakan “*zoon politicon*”, yang berarti bahwa hubungan antarmanusia merupakan bagian integral dari diri mereka. Hubungan antarmanusia memiliki berbagai bentuk dan taktik yang berbeda di zaman sekarang ini. Meski begitu, fungsi fundamental humas tetap menjadi penghubung atau penghubung antara suatu pihak yang diwakili oleh Humas dengan pihak-pihak lain dalam suatu struktur sosial. *Public Relations* (PR) secara garis besar merupakan suatu proses interaksi yang berupaya untuk menumbuhkan pengetahuan, motivasi, dan partisipasi masyarakat di samping membentuk opini publik yang menguntungkan kedua belah pihak. Membangun niat baik, kepercayaan, pengertian, dan citra publik yang positif adalah tujuan dari prosedur ini. Menurut Crystallising Public Opinion, humas (PR) merupakan profesi yang mengawasi hubungan suatu perusahaan dengan publik,

yang berdampak pada kelangngan perusahaan (Widjaja dalam; Gasing dan Suryanto 2016).

Hubungan masyarakat dapat secara spesifik didefinisikan sebagai fungsi manajemen unik yang membantu pengembangan dan pemeliharaan saling pengertian, kerja sama, dukungan, dan komunikasi antara organisasi dan masyarakat umum. Mengelola isu-isu, membantu manajemen dalam memahami dan menanggapi opini publik, menguraikan dan menekankan tugas manajemen dalam pelayanan kepentingan publik, berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk melihat tren, membantu manajemen mengikuti perkembangan dan memanfaatkan perubahan, dan menggunakan strategi penelitian dan komunikasi yang efektif sebagai alat yang penting. (Gasing dan Suryanto, 2016:11).

Humas pada instansi pemerintah berfungsi menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Bagian kehumasan ini disusun untuk mempublikasikan kebijakan dan penyampaian segala informasi kepada masyarakat, serta memberikan fasilitas yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Pemerintahan yang demokratis adalah ciri pemerintahan yang sukses, sehingga memerlukan kemitraan yang bertanggung jawab secara sosial berdasarkan kepentingan bersama. Di semua negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, lembaga humas sangat diperlukan. Humas berperan sebagai kelanjutan dari proses penentuan kebijakan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, dengan sikap yang diselaraskan dengan kepentingan individu atau kelompok, sehingga lembaga atau lembaga tersebut dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat (Rachmadi, 2010).

Mengenai posisi humas dalam lembaga pemerintah, Cutlip dan Center (2000) dalam (Nugraha, 2014) menyatakan bahwa agar humas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih sukses, idealnya mereka menjadi anggota tim inti, yang bekerja langsung di bawah arahan manajer puncak atau pengambil keputusan. Menurut Edward L. Bernay dalam bukunya "*Public Relations*" (1952, University of Oklahoma Press), Tiga tujuan utama humas adalah sebagai berikut: a) Memberikan informasi kepada publik. b) Menggunakan persuasi untuk secara langsung mengubah sikap dan perilaku masyarakat. c)

Mengupayakan rekonsiliasi, baik melalui integrasi maupun inversi, sikap dan perbuatan suatu lembaga atau organisasi dengan masyarakat. (Ruslan, 2010). Dengan peran ini, humas dapat dengan cepat memastikan konteks keputusan yang diambil oleh pimpinan lembaga, sehingga memberikan mereka informasi untuk segera dibagikan kepada publik. Humas idealnya berfungsi sebagai saluran langsung bagi keputusan yang dibuat dalam lingkungan pengambilan keputusan untuk menjangkau masyarakat umum, sehingga memungkinkan penilaian tersebut untuk dipahami dan disetujui. Humas juga bertanggung jawab untuk benar-benar mempertimbangkan pendapat dan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan instansi dan lembaga terkait. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat merupakan tujuan dari humas agar dapat memberikan mereka kesan terbaik dan akurat terhadap perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Membangun reputasi badan usaha atau pemerintah dalam konteks pelayanan publik sangat penting untuk menarik perhatian khalayak yang dilayani oleh badan-badan tersebut dan untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan.

Di bidang keamanan negara, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga pemerintah. Polisi harus membangun tali silaturahmi dengan masyarakat demi menjaga nama baik institusi dan nama baik negara. Polri sebagai sebuah organisasi perlu terus menciptakan dan menumbuhkan kemitraan yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan. Kepolisian Negara wajib memberikan pelayanan masyarakat yang luar biasa dalam melaksanakan tanggung jawabnya, termasuk menegakkan hukum dan memelihara keamanan dalam negeri. Karena itu, Polri memerlukan bantuan dan kolaborasi berbagai pihak lain agar bisa berfungsi. Bagi warga, polisi memberikan “pelayanan” dan “perlindungan” terhadap potensi kejahatan, pelanggaran, dan gangguan. Ketika petugas polisi terlibat aktif dalam masyarakat, sikap, karakter, dan kemampuan mereka termasuk keterampilan terkait perlindungan dan pelayanan dievaluasi. Dengan cara inilah seseorang dapat menilai kualitas “pelayanan” yang diberikan polisi. Oleh karena itu, kewenangan pokok kepolisian harus disebar pada Pos Polisi, Polsek/ta, dan Polres/ta yang paling dekat dengan masyarakat. Faktanya, fenomena buruknya

citra polisi saat ini bermula dari kegagalan mereka dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pegawai pemerintah yang tugas pokoknya melayani masyarakat. Kesulitan yang dihadapi negara kita saat ini telah memunculkan tuntutan masyarakat akan transparansi dan daya tanggap polisi. Polri harus mampu merebut hati masyarakat melalui berbagai prestasi dan menjalin hubungan dengan masyarakat guna meningkatkan nama baik institusi. Dengan memperkuat kemampuan Polri dalam menegakkan hukum serta menegakkan ketertiban dan keamanan sosial, upaya ini berupaya mengubah opini masyarakat.

Jenderal Polisi Listyo Sigit, Kapolri, mengumumkan ungkapan "Presisi" sebagai bagian dari upaya kepolisian untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap lembaga tersebut. Presisi, singkatan dari Predictive, Responsible, dan Fair Transparency, digunakan dalam kampanye tersebut. Untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap lembaga tersebut, setiap anggota kepolisian harus mendukung semboyan yang dicanangkan Kapolri pada awal pelantikannya. Humas atau Public Relations memimpin tugas membangun pengembangan citra di lingkungan organisasi kepolisian.

Sampai saat ini arti dari slogan Presisi masih digunakan dalam berbagai program baik internal Polri maupun eksternal Polri, dari singkatan slogan Presisi diharapkan Polri dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menjadi sarana pengayoman dan pelayanan masyarakat yang baik. Sehingga, penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi dari slogan Presisi dalam kinerja Humas Polres Tuban untuk mewujudkan arti dari Presisi yang telah dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit sejak awal dilantik.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah penulis sebagai berikut :

Bagaimana implementasi slogan Presisi pada Humas Polres Tuban Daerah Jawa Timur?

1.3 Tujuan

Untuk mendeskripsikan bentuk implementasi slogan Presisi pada Humas Polres Tuban Daerah Jawa Timur dalam melaksanakan kinerja sehari-hari.

1.4 Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penulis berharap kajian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pada bidang kehumasan dalam kepolisian, terutama dalam konteks implementasi kebijakan dan slogan institusional.

2. Manfaat Praktis

Dapat mengetahui implementasi yang baik dari slogan Presisi serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, karena menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

